



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT**
Jalan Majapahit No. 44 Mataram Telepon : (0370) 7856244
Laman : ntb.kemenkumham.go.id, Surel : kanwilntb@kemenkumham.go.id

**LAPORAN
EVALUASI TERHADAP KEPEMILIKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA BARAT**

A. Pendahuluan

1. Umum

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat dari tahun ketahun, oleh karena itu pemerintah harus mengikuti perkembangan zaman sehingga tidak ketinggalan zaman dalam hal apapun. Di era yang serba digital pemerintah terus bertransformasi dari konvensional ke digital agar mempermudah masyarakat dalam melakukan administrasi di pemerintahan. Hal ini bertujuan mempermudah masyarakat dan meningkatkan efisiensi dalam hal pelayanan public oleh pemerintah. Selain itu, ini merupakan upaya pemerintah mentransformasikan ke pelayanan digital dari pelayanan konvensional dalam pelayanan public untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Adapun salah satu bentuk transformasi digital pelayanan publik secara internal maupun eksternal dalam proses birokrasi pemerintahan adalah dengan adanya penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai otentikasi dokumen. Sertifikat Elektronik sendiri adalah tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Dii era globalisasi ini, penggunaan teknologi informasi tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Percepatan kemajuan teknologi informasi mendorong kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi. Kemajuan teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam keterbukaan informasi publik dan kemudahan pemberian layanan secara luas kepada masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan good governance dan clean government.

2. Maksud dan Tujuan

Evaluasi kepemilikan sertifikat elektronik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat ini memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah :

- Mewujudkan pelayanan publik yang berasaskan pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government);
- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan;
- Meningkatkan keamanan dokumen yang tersebar di lingkup internal maupun eksternal satuan kerja Kanwil Kemenkumham NTB

3. Ruang Lingkup

Evaluasi terhadap kepemilikan Sertifikat Elektronik yang dilakukan meliputi evaluasi kepemilikan Sertifikat Elektronik yang terdapat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat.

4. Dasar

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.
- e. Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Pelaksanaan penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan Kanwil Kemenkumham NTB dilaksanakan sebagai berikut:

1. Telah terdapat 21 pejabat struktural yang sudah memiliki sertifikat elektronik dari total 30 pejabat struktural yang terdapat di Kanwil Kemenkumham NTB.
2. Sertifikat elektronik hanya diperuntukkan bagi pejabat eselon I sampai dengan eselon IV, hal ini dikarenakan email dinas yang digunakan sebagai kredensial pendaftaran sertifikat elektronik dibatasi aksesnya hanya untuk pejabat eselon I sampai dengan eselon IV.
3. Adapun daftar nama pejabat struktural yang telah maupun belum terdaftar sebagai pemilik sertifikat elektronik dapat dilihat pada gambar berikut:

DAFTAR PEGAWAI YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKAT ELETRONIK				
No	NIP	Nama	Kepemilikan SE	Keterangan STATUS BSRE
1	19770626 199703 1 001	ROMI YUDIANTO, S.H., M.H.	SUDAH	
2	19740704 199903 1 001	ANTON EDWARD WARDHANA, S.Kom., M.Si.	SUDAH	
3	19660117 199001 1 001	HERMAN SAWIRAN, Bc.I.P., S.H., M.H.	SUDAH	
4	19721101 199903 1 001	YAN WELY WIGUNA, S.Sos., M.Si.	SUDAH	
5	19711219 200312 1 001	ZULHAIRI, S.H., M.H.	SUDAH	
6	19820228 200604 1 001	FEBRI NURDIAN SATRIATAMA, S.H., M.B.A.	SUDAH	
7	19680206 199103 1 002	AMAM SAIFULHAQ, S.H.	SUDAH	
8	19701231 199303 1 003	LALU JUMADI, S.H., M.H.	SUDAH	
9	19700115 199203 1 001	SAMSU BIZAL, S.Sos., M.Si.	SUDAH	
10	19690121 199003 1 002	NGURAH MAS WIJAYA KUSUMA, S.H., M.H.	BELUM	NOT_REGISTERED, User belum terdaftar
11	19771203 200501 1 001	PUAN RUSMAYADI, S.H., M.H.	SUDAH	
12	19681115 199703 2 001	PURI ADRIATIK CHASANOVA, S.H.	SUDAH	
13	19760502 200212 1 001	PUNGKA MARUDUT SINAGA, S.Kom., M.H.	SUDAH	
14	19671231 199103 1 005	MUZHAR, S.H., M.H.	SUDAH	
15	19871028 201012 1 003	RICKY ADITYA SUPRATMAN, S.E.	SUDAH	
16	19820521 201012 1 003	IGEDE PERIMA WASANA, S.E.	SUDAH	
17	19741124 199703 1 001	I MADE SARTANA DITA, S.H.	SUDAH	EXPIRED, User sudah terdaftar dan memiliki sertifikat dengan status EXPIRED
18	19760228 200012 1 001	RACHMAD MINTARIA, A.Md.I.P., S.Sos., M.Si.	SUDAH	
19	19660606 199001 1 001	ANTONIUS BAMBANG YUNIARTO, S.H.	SUDAH	
20	19830520 200112 2 001	RIVA DILYANTI, A.Md.I.P., S.Sos.	SUDAH	
21	19690710 199003 1 003	SUNARYO, S.H.	SUDAH	
22	19691028 199303 2 001	GUSTI AYU MADE WIDNYANI, S.H., M.H.	BELUM	NEW, User belum melakukan aktivasi. User belum melakukan aktivasi
23	19760916 200112 1 001	IDA BAGUS ARY YAMUNA, S.H., M.H.	BELUM	NEW, User belum melakukan aktivasi. User belum melakukan aktivasi
24	19860328 200604 1 001	DANIS PASKAH, S.H., M.H.	BELUM	BELUM MELAKUKAN PENGAJUAN
25	19840208 200501 2 001	ISNA MATYA FEBNURIJANNAH, YN., S.H.	BELUM	NEW, User belum melakukan aktivasi. User belum melakukan aktivasi
26	19720723 200112 1 001	GUSTI NGURAH SURYANA YULIADI, S.H., M.H.	BELUM	NEW, User belum melakukan aktivasi. User belum melakukan aktivasi
27	19671231 198903 1 169	BAMBANG MUSTIKO N, S.H.	SUDAH	EXPIRED, User sudah terdaftar dan memiliki sertifikat dengan status EXPIRED
28	19790610 200003 1 002	MUHAMAD AMIN IMRAN, S.H., M.H.	BELUM	NOT_REGISTERED, User belum terdaftar
29	19711231 199103 1 002	SUPARDAN, S.H.	SUDAH	
30	19850909 200501 1 001	INDRA FIRMANSYAH, S.H.	SUDAH	

C. Hasil yang Dicapai

Adapun beberapa hasil evaluasi kepemilikan SE pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

- Sosialisasi serta penggunaan sertifikat elektronik dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik itu sendiri.
- Meningkatkan orisinalitas dokumen elektronik yang telah tercantum sertifikat elektronik didalamnya
- Mendukung program pemerintah terkait penerapan pemerintahan berbasis elektronik guna memberikan pengamanan digital terhadap dokumen-dokumen negara.

D. Simpulan dan Saran

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan Evaluasi kepemilikan sertifikat elektronik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat dengan hasil antara lain:

- Terdapat 21 pejabat struktural memiliki SE dari total 30 pejabat struktural yang terdapat di Kanwil NTB.
- Perlunya sosialisasi dan koninuitas penggunaan SE dalam transaksi dokumen digital guna memberikan identitas digital terhadap para pihak yang bertransaksi pada dokumen tersebut.
- Kantor Wilayah belum memiliki akses tersendiri untuk melihat pengajuan pegawai secara menyeluruh di lingkup NTB, sehingga jika terjadi kendala harus tetap melalui pusdatin dan kurang efisien terhadap waktu.

E. Penutup

Demikian Laporan Evaluasi Terhadap Kepemilikan Sertifikat Elektronik ini dibuat sebagai pemenuhan data dukung laporan SPBE Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB Tahun 2023.

Dibuat di Mataram
pada tanggal 07 September 2023

Kepala Kantor Wilayah,

Romi Yudianto
NIP 197706261997031001